

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengimplementasian kebijakan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bidang kesejahteraan sosial berupa jaminan sosial di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018. Serta menganalisis secara kritis sejauh mana pelayanan pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah terpenuhi melalui implementasi kebijakan disabilitas, komunikasi yang dilaksanakan antar instansi terkait yang mengurus jaminan sosial bagi penyandang disabilitas, sumber daya yang ada di Kabupaten Gunungkidul sebagai pemberi pelayanan atau jasa termasuk di dalam disposisi dan struktur birokrasi. Bahkan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat penyandang disabilitas sebagai penerima jasa jaminan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Gunungkidul, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melihat dari *Hypotheses Testing: Summary of the Path Analysis Evaluation* yang terdapat pada tabel 5.6 dan juga hasil wawancara yang dilaksanakan di beberapa instansi terkait dalam pengimplementasian kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas berupa jaminan sosial bahwa untuk pelaksanaan kebijakan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap disposisi atau

karakteristik dan perilaku pemberi jasa layanan, dan komunikasi yang terjalin antar instansi dan penerima jasa (penyandang disabilitas) mengenai bantuan jaminan sosial, serta struktur birokrasi yang tidak panjang atau terfragmentasi dan juga sesuai SOP sudah berhasil dilaksanakan dan penerima jasa atau masyarakat penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan jaminan sosial merasa puas dengan hal tersebut. Begitu pula untuk komunikasi terhadap sumber daya, struktur birokrasi dengan disposisi dan sumber daya terhadap disposisi pada bagian ini pemberi jasa maupun penerima jasa merasa puas dan sudah memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Namun, pada pengimplementasian kebijakan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berupa jaminan sosial terdapat kendala berupa sumber daya yang tidak memadai, kekurangan sumberdaya sebagai ahli IT maupun SDM yang melaksanakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dikarenakan Dinas Sosial tidak hanya memiliki tugas untuk mensejahterakan masyarakat penyandang disabilitas, namun lansia, anak jalanan, rehabilitas dll. Selain itu, komunikasi terhadap disposisi dan struktur birokrasi masih mengalami kendala dikarenakan jarak tempuh yang jauh antar instansi dan masyarakat serta kadang kala terjadi miss komunikasi antar instansi dalam memberikan pelayanan terutama soal pendataan jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang layak mendapatkan bantuan jaminan sosial. Terakhir sudah sangat jelas dengan permasalahan tersebut maka untuk struktur birokrasi terhadap sumber daya

pun tidak signifikan dalam pelaksanaan pelayanan jaminan sosial di Kabupaten Gunungkidul.

B. Saran

1. Saran untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan pada studi tentang implementasi kebijakan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berupa jaminan sosial di Kabupaten Gunungkidul dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berupa jaminan sosial. Oleh karena itu, , perlu adanya keberlanjutan dari penelitian ini yang meneliti mengenai implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam fokus yang berbeda yang masih terkait di dalam kesejahteraan sosial menurut UU No 8 tahun 2016. Penelitian tentang implementasi ini juga diharapkan dapat mengukur dan mengevaluasi kebijakan dari pemerintah tersebut untuk mengembangkan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah masing-masing.

2. Saran untuk pemerintah yang terlibat dalam pengambilan kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini, temuan di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa untuk mengimplementasikan

kebijakan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap sumber daya, komunikasi terhadap disposisi dan struktur birokrasi serta struktur birokrasi terhadap sumber daya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan jaminan sosial tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama pada sumber daya yang bertugas melaksanakan pelayanan atau pemberi jasa berupa jaminan sosial.

Hal ini perlu untuk dilakukan guna meningkatkan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut. Terkhusus untuk Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yang memiliki kendala SDM cukup signifikan dalam pendataan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan jaminan sosial, hal ini juga berkaitan dengan sistem yang digunakan saat mendata serta jumlah SDM yang mendata.